

KEBIJAKAN DIASPORA INDIA DI ASIA TENGGARA: CORAK STRATEGI EKONOMI DALAM IKATAN IDENTITAS BUDAYA

Naufal Azizi

Abstract

The paper describes the economic influence in the cultural policy seen through the big number of the diaspora of ethnic and national of India in Southeast Asia. Although in one hand, the India diaspora is one of the substantial sources in developing India, however, on the other, there are some obstacles found in this matter, such as that the Indian policy is partial against other countries in Southeast Asia, so as that the countries of Southeast Asia partial against the Indian diaspora. The writer of this paper, starts his argument with the idea to offer double citizenship to the Indian migrants, and then seeing in social perspective the Indian cultural identity in Southeast Asia. Besides this, the writer brings to highlight the bilateral relation between India and Indonesia and last is the importance of how the Indian government places itself among the Southeast Asian countries, which may become a way of approach the countries of Southeast Asia encounter the migrants of India.

Keywords

policy of India diaspora, Southeast Asia, economy, cultural identity, double citizenship.

Abstrak

Tulisan ini menggambarkan pengaruh ekonomi dalam kebijakan budaya melalui besarnya diaspora India di Asia Tenggara. Diaspora India dipandang sebagai salah satu sumber penghasilan dalam meningkatkan pembangunan India oleh pemerintah setempat. Namun, masih ditemui banyak kendala: kebijakan itu tumpang tindih karena pandangan negatif Pemerintah India tentang berbagai negara di Asia Tenggara. Belum lagi, perlakuan yang sama juga dilakukan oleh negara Asia Tenggara terhadap diaspora India. Penulis ini mengawali pembahasan dengan menjelaskan penawaran konsep dwikewarganegaraan kepada diaspora India. Selanjutnya, ia menggali data yang terkait dengan identitas budaya India dalam kehidupan sosial di Asia Tenggara. Selain itu, penulis ini membahas keadaan di Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Pemerintah India. Tulisan ini diakhiri dengan memperlihatkan betapa penting pandangan India tentang Asia as method bagi berbagai negara Asia.

Kata Kunci

Kebijakan Diaspora India, Asia Tenggara, Ekonomi, Identitas Budaya, Dwi Kewarganegaraan

PENGANTAR

Statistik Populasi Global (Geohieve) menyatakan bahwa saat ini India adalah negara kedua yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia.¹ Bahkan, laporan

¹ Geohive mencatat populasi India sekarang berjumlah 1.274.000.924 jiwa. Jumlah itu mengalami peningkatan setelah pada tahun 2011 Badan Pusat Statistik India (COI) mengumumkan bahwa penduduk

terbaru “Prospek Penduduk Dunia” (PBB 2013) memprediksi India akan melampaui Tiongkok pada 2055.² Statistik itu mendeskripsikan bahwa India berpotensi besar dalam dinamika kehidupan dunia. Bangsa India dikenal sebagai manusia terbang atau perantau. Mereka hampir menyebar rata ke semua negara di dunia, termasuk Asia Tenggara.

Secara historis, kontak masyarakat India dengan berbagai bangsa di Asia Tenggara sudah terjalin lama. Itu dapat dilacak dari berbagai peninggalan, seperti arsitektur, tradisi, agama, pakaian, bahkan bahasa yang berbau India. Pengaruh itu semakin besar setelah era pascakolonial. Tidak salah apabila Asia Tenggara menjadi bagian penting dari diaspora India. Sampai sekarang mereka terus berbaur dan membentuk kehidupan sosial budaya masyarakat Asia Tenggara. Komunitas India makin mudah dijumpai di berbagai wilayah itu.

Maraknya komunitas India di Asia Tenggara membuat pemerintah India memikirkan ulang bagaimana mengorganisir diaspora itu. Pemerintah India mengambil langkah dengan menciptakan *Indian Diaspora* dengan beberapa kebijakan. Dalam penelitian ini saya berusaha mencermati kebijakan itu. Berapa jauh dampak kebijakan itu pada diaspora India yang hidup di Asia Tenggara. Selain itu, saya mencoba melihat perspektif pemerintah India dalam menyikapi kebijakan yang diambil dalam ruang lingkup hubungan negara.

Berdasarkan penelitian tersebut, pertama, tulisan ini hanya akan mengulas berbagai kebijakan diaspora India di Asia Tenggara. Kebijakan yang akan dibahas terkait dengan proses memperoleh dwikewarganegaraan (*dual citizenship*). Kedua, tulisan ini memperlihatkan perkembangan diaspora India di Asia Tenggara dalam bidang budaya dan respon kebijakan negara setempat pada masyarakat India. Ketiga, memperlihatkan posisi Indonesia sendiri dalam penerapan kebijakan *Indian Diaspora* yang diberlakukan oleh Pemerintah India. Dalam mengkaji ketiganya, saya ingin menentukan sejauh mana India memosisikan diri sebagai negara Asia dan melihat negara Asia dalam perspektif *Asia as Method*.

SKEMA KEBIJAKAN DIASPORA

Ada beberapa kebijakan diaspora yang diambil oleh pemerintah India dalam laporan tahunan 2012-2013, antara lain Pravasi Bharatiya Divas (PBD), Kartu Persons of Indian Origin (PIO), kartu Overseas Citizens of Indians (OCI), program beasiswa buat anak-anak diaspora (SPDC), serta program Mengenal India (KIP). Dari beberapa program itu, saya menyoroti Kartu Keturunan India Asli (PIO) dan OCI. Kartu itulah

mereka hanya berkisar 1.210.854.977 jiwa.

² www.AntaraNews.com diakses pada Sabtu, 29 November 2014, pukul 15.15 WIB.

yang akan difungsikan sebagai hak atas status dwikewarganegaraan bagi diaspora di Asia Tenggara.

Tujuan pengadaan kartu tersebut adalah untuk mewujudkan kembali ikatan emosional warga India dengan tanah kelahiran, India. Tidak hanya itu, dampak ekonomi juga lebih besar. Pemerintah India berharap bahwa mereka yang memiliki kartu PIO/OCI mampu memberikan sumbangsih dalam menopang perekonomian India. PIO sendiri merupakan keturunan asli India yang tinggal di luar negeri. Setidaknya, mereka telah mempunyai paspor atau kedua orang tuanya pernah terdaftar sebagai warga negara India, atau juga memiliki pasangan istri atau suami yang berasal dari India.

Diaspora India memiliki keuntungan jika memperoleh kartu PIO/OCI. Mereka tidak membutuhkan lagi visa bila melakukan kunjungan ke India. Mereka juga tidak perlu repot melaporkan diri sebagai warga negara asing jika tinggal di sana kurang dari 180 hari. Mereka juga memiliki persamaan hak sipil dengan Non-Resident Indian (NRI) dalam segala bidang kecuali hak kepemilikan tanah. Jika dilihat manfaat yang diperoleh oleh Diaspora India, keuntungan itu sangat strategis.

Sayangnya, kebijakan itu masih diterapkan secara tebang pilih. Pemerintah India tidak menerapkannya ke semua diaspora India. Hanya negara tertentu saja yang mendapat kesempatan untuk mendaftar sebagai *dual citizenship*. Coba perhatikan *blueprint* kebijakan pemerintah India di bawah ini.

36.57. The Committee wishes to emphasise that at this stage dual citizenship is proposed to be granted only to the citizens of Indian origin in certain specified countries such as countries of North America, Europe, Australia, New Zealand, Singapore, etc. Those are highly developed countries. It is to those countries that the migration of Indians took place after India became independent. Most of those who migrated to those countries were Indian citizens. Some of them continue to be Indian citizens and hold Indian passports. Many of them are under pressure to take the citizenship

Dual Citizenship

of the countries where they live but would like to retain their Indian citizenship. The Committee

Sumber: www.indiandiaspora.nic.in

Kebijakan tersebut jelas mengesampingkan diaspora India di Asia Tenggara. Jelas bahwa kata "*highly developed countries*" membuktikan negara Asia Tenggara tidak termasuk dalam kategori itu karena semuanya adalah negara berkembang, kecuali Singapura. Tentu, kategorisasi itu menyimpan maksud tersendiri: Pemerintah India sekadar memanfaatkan diaspora India dari prospek ekonomi. Negara itu memiliki PDB yang signifikan. Terlebih mengingat syarat pendaftaran itu mewajibkan uang

pendaftaran sebesar 365 dolar Amerika Serikat dan hanya berlaku 20 tahun.³

Selanjutnya, jika menganalisis alasan pemerintah India dalam pembatasan kebijakan tadi, frasa *“took place after india become independence”* di situ menjelaskan hubungan pemahaman waktu dengan tempat kurang sesuai. Padahal ikatan tempat dengan waktu itu sifatnya cair. Justru keadaan itu harus terwujud selama ada kedekatan emosional di dalamnya. Akibatnya, nilai guna pun dapat berubah (Yi Fu Tuan: 1997). Kondisi itu malah memberi jarak antara diaspora India di Asia Tenggara dan *homeland* mereka. Apalagi mereka seolah dikesampingkan dengan kebijakan itu. Di samping itu, kebijakan di atas mengurai alasan India mengapa identitas diaspora dibatasi pada individu yang memiliki kewarganegaraan resmi India.

Interpretasi saya atas teks tersebut meninggalkan dua tanda tanya besar. Pertama, bukankah pada awalnya semua imigran India di negara lain adalah warga India asli. Kemudian, jumlah mereka membesar dan membentuk diaspora. Kedua, jika teks itu menggambarkan kuantitas warga India yang melakukan migrasi ke berbagai negara itu juga kurang tepat. Saya akan menunjukkan perbandingan jumlah populasi Non-Resident Indian (NRI) dan Period of Indian Origin (PIO) di Asia Tenggara dengan negara-negara itu. Data diperoleh dari Kementerian Urusan Warga India di Luar Negeri (MOIA).⁴

Nama Negara	Jumlah Diaspora India	
	-	Asia Tenggara
Amerika Utara	3.857.615	3.325.158
Eropa	2.113.882	
Australia	448.340	
Selandia Baru	110.000	

Tabel 1. Perbandingan Populasi Diaspora India.

Data tersebut secara gamblang membantah pernyataan Pemerintah India mengenai populasi diaspora India di Asia Tenggara yang tidak besar. Dapat kita lihat bahwa Amerika Utara yang menunjukkan angka diaspora terbesar ditopang oleh jumlah diaspora Amerika Serikat, Kanada, Trinidad, dan Tobago. Adapun komunitas India di negara lain di Amerika Utara tidak lebih dari 20 ribu jiwa.

Sebenarnya, pihak Pemerintah India sendiri menegaskan bahwa selama ini mereka enggan mengenal konsep dwikewarganegaraan. Akan tetapi, fakta kebijakan tadi menggambarkan bahwa hak sipil dari kartu PIO/OCI hampir sama dengan warga negara India. Mereka diperlakukan sama dengan warga India yang bermigrasi ke luar

³ www.immihelp.com/nri/pio-vs-oci.html (Situs resmi Pemerintah India).

⁴ Data itu terakhir yang diperbarui oleh MOIA pada Mei 2012. Saat ini, pemerintah India mencatat bahwa populasi PIO dan NRI di seluruh dunia hampir mencapai 22 juta jiwa. Sementara itu, angka dalam tabel di atas hanya mencantumkan negara yang mendapat pengakuan dari dunia internasional.

negeri (NRI). Sementara itu, dalih *dual citizenship* untuk negara yang sudah disebutkan tadi kurang tepat. Masalahnya, warga India yang sudah bermigrasi dan menetap dalam kurun waktu tertentu sama-sama memiliki keterbatasan dalam hak politis. Mereka tidak diizinkan untuk bekerja di institusi pemerintah dan tidak mempunyai hak pilih. Namun, mereka masih diharuskan membayar pajak pendapatan.

Analisis saya semakin terbukti setelah mengamati rancangan strategi lima tahun mendatang dari MOIA. Dalam pengantarnya, Kementerian Urusan Warga India di Luar Negeri menjelaskan bahwa selama tiga dekade terakhir migrasi orang India ke luar negeri telah dilatarbelakangi oleh “Ekonomi Baru”. Mari kita lihat fokus Pemerintah India sebelum mengambil langkah strategis untuk diaspora India.

The emergence of significant Diasporas has in recent years brought into sharp focus two key facts. First, there is a large expatriate population of skilled people from emerging economies in the developed world. Second, Overseas communities can constitute a significant resource for the development of the countries of origin. The movement of the high skilled and low skilled workers from less to more developed economies and back opens several new opportunities for development. To view the Diaspora only through the looking glass of remittances and financial flows is to take a myopic view. Not all expatriates need to be

Sumber: www.moia.gov.in.

Ungkapan “*skilled people, emerging economies, developed world*” telah mengindikasikan pentingnya makna diaspora dalam lingkup pembangunan ekonomi India. Pola persebaran diaspora bertujuan untuk membuka peluang bisnis baru bagi pemerintah India dengan negara yang menjadi persinggahan diaspora mereka.

Kepentingan diaspora India di luar negeri tetap diatur sedemikian rupa supaya tidak merugikan sektor ekonomi India. Maka, jelas bahwa kalkulasi ekonomi selalu menjadi pertimbangan utama dalam merawat diaspora India. Aihwa Ong menyebut kondisi kewarganegaraan diaspora India yang tidak menentu itu dengan “*Flexible Citizenship*”. Pendapatnya menguatkan asumsi Michael Foucault melalui pemanfaatan populasi sebagai ruang kuasa modern dengan menekan regulasi demi memperoleh keuntungan ekonomi berdasarkan relasi produktif, ritual, dan kepercayaan (dalam Arie Setyaningrum: 2004). Itu pun mereka yang mendaftar PIO/OCI tidak serta-merta lulus seleksi. Pemerintah India akan selektif memilih mereka dengan mempertimbangkan keahlian dalam profesi tertentu seperti dokter, farmasi, perawat, hukum, peneliti, arsitektur, dan akuntan.

Kebijakan tersebut berbanding tebalik dengan respon negara Asia Tenggara. Saya mengambil contoh Indonesia yang saat ini justru sedang mengkaji konsep dwikewarganegaraan. Pemerintah dan Jaringan Diaspora Indonesia bekerja sama dengan beberapa universitas, termasuk Universitas Indonesia, untuk melakukan diskusi secara bergilir melalui pendekatan hukum tentang benturan konsep itu dengan aturan

konstitusi yang sudah dibuat.⁵ Pihak pemerintah meyakini bahwa dwikewarganegaraan akan meningkatkan rangsangan ikatan kembali dengan tanah kelahiran mereka.

RELASI DIASPORA INDIA

Jelas bahwa arus globalisasi memicu warga India untuk melakukan migrasi. Mobilitas dalam globalisasi tengah mengubah pandangan bahwa tidak ada batasan negara. yang pada akhirnya, oleh Marshall McLuhan dianggap sebagai membentuk sebuah desa global (Diana Crane: 2004). Afiliasi India dan Asia Tenggara dapat ditelusuri pada awal milenium sebelum masehi (Makeswary Periasamy: 2007). Meskipun begitu, masih banyak literatur yang memperdebatkan awal kedatangan bangsa India ke Asia Tenggara. Namun, ada kesepakatan bahwa perpindahan itu terjadi baik melalui darat maupun laut. Motif utama kedatangan bangsa India adalah faktor ekonomi. Komunitas India lebih banyak bermain di sektor perdagangan. Mereka berbeda dari orang Eropa yang sangat tertarik pada kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Asia Tenggara.

Di sini, saya akan menelusuri laporan Dewan Komite Tinggi Diaspora India dalam perspektif budaya pascakolonial. Migrasi besar India terjadi selama abad ke-19 dan ke-20 ke bekas negara koloni Inggris, Prancis, dan Belanda. Mereka datang untuk bekerja sebagai buruh kontrak dan pekerja profesional. Sistem itu lebih dikenal sebagai *kangany*.⁶ Apalagi, setelah penghapusan perbudakan, kedatangan mereka semakin masif. Oleh sebab itu, banyak peninggalan sejarah yang kental dengan nuansa India di Asia Tenggara. Tengok saja gedung Garudwara Siri Guru Sigh Sabha di Bangkok, Candi Prambanan di Yogyakarta, Kuil Batu Caves di Kuala Lumpur, Serangoon Road di Singapura, dan Candi Sri Thenday Yuttaphani di Vietnam.

Memang, populasi diaspora India di Asia Tenggara sangat besar, Angkanya menempati urutan kedua setelah benua Amerika. Berikut sebaran spesifik diaspora India di Asia Tenggara.

⁵ [Http://www.diasporaindonesia.org/](http://www.diasporaindonesia.org/) adalah sebuah situs resmi dari pemerintah Indonesia untuk membangun Jaringan Diaspora Indonesia. Jaringan itu sendiri dibentuk atas inisiatif Dino Patti Jallal, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, baru pada tahun 2012.

⁶ Sistem perekrutan buruh perkebunan kopi dan karet di Malaysia yang dikembangkan pada akhir abad ke-19. *Kangany* berasal dari bahasa Tamil yang berarti atasan buruh. Sistem ini membuka jalan bagi komunitas India untuk bermigrasi secara bersar-besaran ke Malaysia.

Nama Negara	Jumlah Populasi Diaspora		
		PIO	NRI
Malaysia	2.050.000	1.900.000	150.000
Singapura	670.000	320.000	350.000
Myanmar	356.560	353.400	3.160
Thailand	150.000	60.000	90.000
Filipina	50.000	3.000	47.000
Indonesia	36.050	35.000	1.050
Lain-lain	12.548	148	12.400
Total	3.325.158	2.671.548	653.610

Tabel 2. Populasi Diaspora India di Asia Tenggara.

Maka dari itu, untuk memahami lebih jauh bagaimana komunitas diaspora India berinteraksi dengan masyarakat Asia Tenggara, mari kita lihat lima negara Asia Tenggara yang memiliki jumlah diaspora India terbesar dari segi demografi sosial. Angka merepresentasikan identitas budaya India yang memengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara itu.

Malaysia

Sampai saat ini, Malaysia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang memiliki PIO yaitu 2.050.000 jiwa, artinya nomor dua setelah Amerika Serikat. Hubungan India-Malaysia sudah berlangsung puluhan tahun. Kebutuhan pekerja perkebunan pada masa kolonialisme Inggris adalah faktor pokok migrasi itu. Sebagian besar diwakili oleh Tamil (80%), diikuti oleh Keralites, Andhrites, Bengali, Punjabi, Sindhi, dan Gujarat. Kebanyakan orang India menetap di negara bagian Penang, Perak, serta sebagian isanya di Kuala Lumpur dan Selangor. Kontribusi masyarakat India pada PDB Malaysia adalah sekitar 2 persen.

Sementara itu, sebagian besar orang India di Malaysia bekerja di perkebunan karet dan sawit, kepolisian, lembaga kereta api, bisnis makanan, berprofesi hukum dan medis. Sebagian besar orang India di sana tetap terikat pada perkebunan, dan kurang merespon pendidikan dan ekonomi. Meskipun ada fasilitas sekolah gratis, justru jumlah sekolah Tamil di Malaysia mengalami penurunan. Dari 720 pada 1963 menjadi 526 pada tahun 2000.

20.33. It is difficult to acquire Malaysian citizenship and PIOs/NRIs with continuous residence for 10-15 years and having a Malaysian spouse are considered selectively for Malaysian citizenship.

Di Malaysia, ada beberapa asosiasi yang berhubungan dengan India, seperti Organisasi PIOs, Asosiasi Malaysia Lulusan Universitas India (MAIUG), Organisasi Global India Asli (GOPIO), dan Masyarakat Lulusan Kedokteran India dan Malaysia

(SOMGRIM). University of Malaysia memiliki pusat kajian India yang berfokus pada bahasa India dan Tamil. Ada juga sekolah milik kuil Narain Laxmi yang mengajarkan bahasa Hindi. Di samping itu, media juga berpengaruh besar pada perkembangan kebudayaan India di Malaysia. Contoh, pertunjukan musik klasik dan tarian India yang diselenggarakan secara rutin oleh The Temple of Fine Arts, Sutra Dance Theatre, Shektra Dance Group, dan Tanji Kamla Dance Group. Terdapat pula harian terkemuka Tamil, yaitu *Tamil Nasionl* dan *Malaysia Namban*. Meskipun tidak ada saluran radio/TV etnis India, Astro dan Mega banyak menampilkan program India.

Walaupun begitu besar pengaruh dari diaspora India di Malaysia, masyarakat Malaysia pada umumnya masih menganggap orang India sebagai kelas dua di negara mereka. Keadaannya tidak jauh berbeda dari perlakuan Pemerintah Malaysia. Mereka sering kali menyulitkan diaspora India di sana. Walaupun begitu, melalui frasa "*consular assistance is provided*", pemerintah India masih tetap memberikan pelayanan kepada diaspora India di Malaysia.

Demands and Expectations of the Diaspora

- 20.35. Malaysia continues to attract illegal work force and job racketeers based in India in collusion with their counterparts in Malaysia allure job aspirants to come to Malaysia on tourist/social visas after payment of hefty sums. Once in Malaysia, they are employed illegally mostly as labourers in plantation and construction sites on meagre wages and often apprehended by the Immigration authorities. Consular assistance is provided to them by the Indian Mission. Deportation of those
- 20.36. Ethnic Community in Malaysia feels that there should not be any visa requirement for them. One of the main grievances of the Indian community is the hurdle of bureaucracy in business ventures and also the difficulties in transportation and hotel accommodation. They also feel that India has not exploited Malaysia's tourist potential.

Sumber: www.indiandiaspora.nic.in

Kata "*visa requirement, bureaucracy in business, transportation, hotel accommodation*" lagi-lagi menekankan segi ekonomi. Pemerintah India kurang memperhatikan pengembangan budaya dan identitas "India" warganya tetap terjaga. Bahkan, diaspora dan Pemerintah India lebih mementingkan pengembangan kewirausahaan untuk menopang bisnis di India. Sebaliknya, celah itu juga dimanfaatkan oleh Malaysia sebagai ruang investasi bagi PIO yang masih memegang kewarganegaraan Malaysia. Celah itu terlihat dalam poin pertama dalam rekomendasi pembuatan kebijakan diaspora bagi pemerintah India.

Singapura

Pemerintah India menganggap bahwa Singapura adalah tempat penting bagi diaspora mereka. Kebijakannya menyebutkan bahwa Singapura menjadi salah satu

negara yang mendapat prioritas untuk mendapat dwikewarganegaraan. Perjalanan historis antara Singapura dan India berawal dari kedatangan Sir Stamford Raffles yang bersama dengan rombongan diaspora India, salah satunya Naraina Pillay, seorang Hindu asal Penang (Singh Sandhu, 2006: 774). Ia tiba di Singapura pada 1819 untuk mendirikan semacam pangkalan keamanan buat perusahaan kapal East-India. Singkat cerita, komunitas India dipekerjakan sebagai budak. Seiring dengan perkembangan Singapura yang melesat, gelombang migrasi India melonjak drastis.

Dari segi kebudayaan, masyarakat India adalah yang paling beragam sebagai komunitas etnis Singapura. Sekitar 64% berasal dari Tamil. Oleh karena itu, Tamil digunakan sebagai salah satu dari empat bahasa resmi Singapura selain Cina, Melayu, dan Inggris. Etnis Punjabi juga tergolong cukup besar, terutama masyarakat Sikh (7%), yang sebagian besar tiba di Singapura sebagai anggota tentara dan polisi Inggris. Lainnya adalah Malayalis (8%), Sindhi (6%), dan Gujarat (2%). Diaspora India juga punya beragam agama. Diperkirakan 50–60% beragama Hindu, 20–30% Muslim, 12% Kristen, 7% Sikh, dan 1% Budha.

20.68. The Indian community in Singapore, whether PIO or NRI, is largely content with its life and lifestyle. The Singaporean authorities accord equal treatment with regard to their basic demands, such as housing, schooling, recognition of cultural traditions, etc. The community is now overwhelmingly local born and linked to India primarily through the maintenance of cultural traditions, rather than by any nationalistic feelings. Those who were born and brought up in

20.69. All Indian religions are represented in Singapore. There are quite a few gurudwaras, temples, churches and mosques as also religion based associations, such as, the Ramakrishna Mission. The media being government controlled, there are no privately owned radio or TV channels in Singapore. However, the government has allocated one radio and one TV channel exclusively for the Indian community. The programmes on these channels are primarily in Tamil, though other

d) Dual citizenship, removal of residence qualification and simplified procedure for acquisition or re-acquisition of Indian citizenship.

Sumber: www.indiandiaspora.nic.in.

Berbeda dari Malaysia, diaspora India sudah menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Ada yang memegang jabatan penting sebagai kepala karena kemampuan bahasa Inggris mereka. Beberapa yang menonjol dalam politik Singapura dan Pemerintah, saat ini adalah mantan Presiden, Sellapan Rama Nathan, mantan Menteri Luar Negeri dan Hukum, Prof. S. Jaykumar, dan pemimpin oposisi, JB Jeyaretnam. Di sektor ekonomi, mereka juga lebih baik daripada etnis Melayu, khususnya di bidang yang menuntut keterampilan tinggi. Sementara itu, perkembangan budaya juga tidak kalah penting meskipun tidak dijelaskan secara spesifik oleh Dewan Komite Tinggi Diaspora India.

Perbedaan mencolok tentu terdapat dalam laporan tersebut. Pihak pemerintah India seolah memperlakukan secara istimewa dengan memberikan catatan baik mengenai diaspora India di Singapura. Kata “*equal treatment*” adalah sikap pemerintah Singapura yang melatarbelakangi argumentasi utama Pemerintah India untuk memberikan hak spesial kepada diaspora Singapura. Keadaan itu tidak ditemukan sebelumnya dalam laporan mengenai Malaysia.

Kata “*represented*” mengindikasikan bahwa keadaan diaspora India di Singapura begitu mapan sehingga penting untuk keberlangsungan ritualitas budaya India. Situasi seperti itu mencerminkan pendapat pemerintah India jika negara maju akan menjamin kehidupan diaspora mereka lebih terjamin. Tentu, Singapura menjadi satu-satunya negara yang masuk dalam kategori negara maju di kawasan Asia Tenggara merupakan patokan pemerintah India dalam menentukan pengambilan kebijakan diaspora.

Padahal, fakta di lapangan cukup mengejutkan. Di sana masih banyak permasalahan deskriminasi terhadap diaspora India. Survei terbaru mengungkapkan bahwa 60 persen keturunan India dan Melayu mengalami deskriminasi dalam hal pekerjaan.⁷ Selain itu, laporan BBC menyebutkan bahwa Komunitas India juga dipersulit dalam penyewaan tempat tinggal di Singapura.⁸ Sementara itu, urusan dwikewarganegaraan juga bukan perkara mudah. Singapura yang mendapat perlakuan istimewa oleh Pemerintah India, dalam undang-undang Singapura, justru tidak memperbolehkan warga negara mereka memiliki kewarganegaraan ganda. Artinya, jika diaspora India mendapat kewarganegaraan India, status kewarganegaraan Singapura mereka akan dicabut. Tentu saja, kondisi itu menjadi dilema tersendiri bagi diaspora India yang ingin punya kewarganegaraan ganda.

Indonesia

Kedutaan Besar India di Jakarta menceritakan bahwa peradaban Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh kuat India. Hindu dan Budha adalah bukti dari hasil akulturasi.⁹ Bentuk lain adalah penamaan Sumatra dan Jawa yang sebelumnya berasal dari Swarna Dwipa atau Java Dwipa. Mitologi Indonesia juga hampir mirip dengan India sehingga ikut menambah khazanah kebudayaan nasional. Maka, tidak mengherankan bahwa serial Mahabrata dan Mahadewa langsung mendongkrak *sharing* dan *rating* salah

⁷ Survei ini diadakan pada 24 Mei 2014 oleh Institute of Policy Studies – National University of Singapore. Jauh sebelumnya, isu ini sudah mendapat perhatian utama bagi diaspora India saat mereka mengadakan dialog langsung dengan Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura, Vivian Balakrishnan, sebagaimana yang dikutip oleh harian utama Singapura, *The Strait Times*, pada 30 Agustus 2013.

⁸ www.bbc.com/news/world-asia-26832115 diakses pada Sabtu, 29 November 2014, pukul 22.48 WIB

⁹ Penelusuran sejarah proses Indianisasi dicatat oleh Triyono Suwito (2009) bahwa ada salah satu bentuk kuat peninggalan Hindu dan Budha adalah prasasti dan relief yang terukir dalam Candi.

satu stasiun televisi nasional.¹⁰

Diaspora India di Indonesia, menurut catatan resmi MAIO, berjumlah 36.050 orang. Catatan ini hanya pemegang kartu PIO dan NRI. Sementara generasi kedua dan ketiga PIO hampir tidak terdeteksi. Meskipun sudah tinggal lama di Indonesia, sebagian besar mereka masih sering menjalani praktik kultural India. Rob Sahab contohnya. Ia dan keluarganya tetap menjalankan Shraday, Rakhsa Bandhan, dan Deepwali. Mereka perlu menunjukkan eksistensi dalam rangka mempertahankan identitas budaya (Padma Indranila: 2012).

Untuk Indonesia sendiri, tidak ada kebijakan khusus dari pemerintah India. Bahkan, jika mengaca di pengamatan Dewan Komite Tinggi (*High Level Committee*) Diaspora India, saya mengamati bahwa diaspora mereka mendapat perlakuan yang baik oleh masyarakat Indonesia. Diaspora India dengan begitu leluasa menjalankan ritual budaya dari nenek moyang mereka. Tidak hanya itu, melalui pusat kebudayaan India di Jakarta, Jawahral Nehru, di kemudian hari kebudayaan India diharapkan mengalami perkembangan pesat dan menjadi sosok sentral dalam kehidupan sosial Indonesia.

- 20.18. The NRIs can acquire citizenship after fulfilling certain conditions prescribed under the immigration laws. There are no discriminatory policies. Indonesians of Indian origin have got the right to franchise in Indonesia.
- 20.19. Most of the Indians are still maintaining their link with India, having properties and bank accounts in India. The Indian community is culturally very active. They actively organise and participate in Indian cultural functions. However, they keep a low profile in the domestic politics. The Economic
- 20.20. The Jawaharlal Nehru Indian Cultural Centre at Jakarta organises various cultural programmes in Indonesia apart from imparting yoga, dance and tabla training. The Indian community is treated well and has integrated itself with the local population due to many centuries of cultural and historical relations. Places of religious worship like Churches, Gurudwaras and temple exist

Sumber: Sumber: www.indiandiaspora.nic.in.

Kata "*no discriminatory, treated well*" dan "*integrated*" menggambarkan kondisi Indonesia yang bertolak belakang dengan dua negara terdahulu. Di Malaysia dan Singapura, diaspora India seperti dianaktirikan dalam kehidupan sosial meskipun jumlah mereka jauh lebih besar dibandingkan yang di Indonesia. Bahkan, komunitas India di Indonesia memiliki laman *IndoIndians.com*, sebuah website yang dibentuk oleh Poonam Sagar untuk melayani masyarakat dengan informasi tentang event dan aktivitas yang ada kaitannya dengan diaspora India.¹¹

¹⁰ [Http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/28/152400726/.Mahabarata.dan.Mahadewa.Dongkrak.Rating.ANTV](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/28/152400726/.Mahabarata.dan.Mahadewa.Dongkrak.Rating.ANTV) diakses pada Senin, 1 Desember 2014, pukul 09.26 WIB.

¹¹ [Http://www.beritasatu.com/dunia/126451-diaspora-india-kekuatan-etnis-untuk-membangun-bangsa-2habis.html](http://www.beritasatu.com/dunia/126451-diaspora-india-kekuatan-etnis-untuk-membangun-bangsa-2habis.html) diakses pada diaskes pada Kamis, 4 Desember 2014, pukul 14.13 WIB

Pertengahan tahun lalu, Juli 2013, Kedutaan Besar India di Jakarta tengah menggelar pertemuan diaspora India. Mereka mengumpulkan beberapa organisasi budaya India untuk mengadakan kegiatan Forum Budaya India sebagai sarana mempererat hubungan bilateral dengan tujuan utama *business-to-business* (B-to-B) antarnegara. Sayangnya, justru Indonesia—selain Kamboja—adalah satu dari dua negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki *strategic plan* formal bagi pemerintah India. Dalam laporan itu, Pemerintah India sama sekali tidak menyinggung cara mengatur dan memosisikan diaspora India di Indonesia pada masa depan. Pemerintah India berkesan membiarkan dan tidak peduli akan diaspora mereka karena tidak ada aturan resmi tentang kebijakan diaspora. Oleh karena itu, tugas Kedutaan Besar India di Indonesia, dalam tuturan Rahul Misra (2011), adalah terus meningkatkan pengetahuan tentang India kepada diaspora mereka.

Negara Lain

Keadaan di negara Asia Tenggara lain juga serupa dengan ketiga negara tadi. Di Myanmar, diaspora India sering mendapat perlakuan deskriminatif dalam hal status sosial. Bahkan, mereka tergolong warga tidak mampu secara finansial. Sementara itu, di Vietnam, pemerintah India justru mengedepankan keuntungan ekonomis. Adapun di Filipina, Brunai Darussalam, dan Thailand kondisinya mirip Indonesia walaupun lebih diperhatikan dengan pemberian masukan oleh Dewan Komite Tinggi untuk *strategic plan*. Dalam pada itu, Laos dan Kamboja, yang memiliki jumlah diaspora India lebih kecil, diaspora India hanya dikeruk dari pemanfaatan pariwisata serta investasi antarnegara. Khusus di Timor Leste, pemerintah India belum pernah menyinggung kebijakan mereka terkait diaspora India di negara itu. Malahan, India belum mempunyai kantor kedutaan di Timor Leste.

RUANG NEGARA-BANGSA DALAM DIASPORA INDIA

Setelah melihat gambaran tentang kebijakan yang dibahas di atas, Pemerintah India memang menerapkan perbedaan kebijakan di setiap negara Asia Tenggara. Keadaan itu bertentangan dengan—setelah saya melihat—cetak biru *strategic plan* untuk jangka lima tahun depan oleh MOIA yang berjudul “*The Sun Never Sets in Diaspora Indians*”.

(i) Core purpose of the Ministry

- Engaging with the Diaspora for a mutually beneficial and symbiotic relationship.
- Establish a vibrant institutional framework to support networks with and amongst Overseas Indians to maximize the development impact for India and enable Overseas Indians to invest in and benefit from the opportunities in India.

Menilik frasa “*development impact*” dan “*invest in and benefit from... in India*” mengisyaratkan bahwa potensi diaspora dieksploitasi untuk pembangunan India. Pemerintah India secara sengaja membangun jaringan ekonomis bagi diaspora mereka untuk menanamkan investasi di India. Dalam rancangan itu, visi utama Pemerintah India adalah secara proaktif mengikat diaspora India untuk kepentingan India. Cara itu menandakan bahwa kebijakan itu, selama ini, hanya digunakan untuk mengikat di tingkat negara. Sementara itu, ikatan sejarah bangsa telah dipinggirkan dalam penyusunan kebijakan.

Sebagaimana dilihat dari penjelasan di atas, diaspora India sangat menggiurkan dari segi perekonomian. Akan tetapi, diaspora India juga berpotensi besar dalam menyumbang identitas budaya. Apalagi jika kita melihat bahwa salah satu sifat identitas adalah cair (*fluid*). Pemerintah India seharusnya menjamin pelestarian keturunan warga India di luar negeri untuk menjalankan ritual budaya serta identitas mereka. Artinya, identitas diaspora berlanjut dalam produksi dan reproduksi baru (Stuart Hall: 1990 dalam Karla, dkk.). Jika membatasi relasi sejarah dan budaya (*shared history and culture*), dalam jangka waktu yang lama pemerintah India dapat memutus mereka dari identitas kebangsaan India.

Di Asia Tenggara belum mempunyai organisasi diaspora India nonpemerintah seperti Global Organisation PIO (GOPIO) di Amerika. Organisasi itu mampu menjembatani masalah etnisitas diaspora India. Oleh sebab itu, mereka sanggup mengatasi masalah PIO generasi kedua dan ketiga yang masih menjadi masalah utama dalam kebijakan diaspora India di negara berkembang seperti di Asia Tenggara.¹² Tidak hanya itu, Els van Dongen, peneliti Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, menjelaskan peran GOPIO justru mampu mengintervensi pemerintah India dalam mengambil kebijakan diaspora mereka.

Sahoo dan Pattanaik dalam *Global Diasporas and Development (2014)* menjelaskan bahwa diaspora akan membawa perubahan multidimensional secara transnasional dalam pembangunan global. Perubahan itu secara tidak langsung akan menarik ketika kita mengamati dengan cermat peleburan dan tarik-ulur perbedaan identitas. Tidak sering pula perbedaan identitas terjadi antara diaspora India pendatang “baru” dan “lama”.¹³ Keadaan itu memunculkan kesadaran diaspora sebagai modal utama. Dalam kesadaran diaspora, seseorang akan mengenal dan memahami perbedaan identitas

¹² <http://grfddt.com/EventDetails.aspx?Type=Events&TabId=30> diakses pada Minggu, 1 Desember 2014, pukul 13.55 WIB

¹³ Kondisi demikian pernah disajikan oleh Amit Singh, Associate Fellow di National Maritime Foundation, New Delhi, dalam makalah seminarnya yang diselenggarakan oleh GRFDDT mengenai isu dan tantangan diaspora India pada tahun 2012.

yang dibawa oleh diri mereka (Clifford, 1994 dalam Karla, dkk).

Diaspora sendiri begitu erat kaitannya dengan kajian migrasi dan transnasional. Namun, kedua konsep itu menyisakan permasalahan ketika kebijakan diaspora tidak diatur secara spesifik dan cenderung lebih mengedepankan masalah ekonomi negara daripada bangsa, seperti yang terungkap di bawah ini.

Kriteria kedua, kekuatan identitas diaspora dalam lintas generasi, adalah hal yang paling menonjol untuk membedakan identitas kelompok diaspora untuk membentuk fenomena yang lebih singkat dari transnasionalisme migran. Selanjutnya, supaya tetap berjalan selama beberapa generasi, kelompok yang terlibat dua-transnasional perlu terus-menerus dijaga melalui generasi pertama yang baru. Ketika negara tersebut sudah tidak memiliki arus (migrasi) baru, atau arus ini dipotong oleh pihak imigrasi di negara setempat, transnasionalisme cenderung memudar seperti apa yang sudah terjadi di Amerika Serikat antara Perang Dunia I dan tahun 1960-an (Rainer Baubock, 2010: 314).

Misalnya kasus kebijakan diaspora tentang generasi kedua akan mengalami nasib yang tidak jelas dalam hubungan negara dan bangsa. Masalah itu dialami oleh generasi kedua perkawinan antara orang Filipina dan Indonesia yang tinggal di Singapura. Identitas budaya generasi kedua dibentuk secara tumpang tindih (Melani Budiarta 2014). Kasus demikian mendorong penguatan gesekan negara dan bangsa. Tidak terhindarkan bahwa keadaan semacam itu membingungkan baik Pemerintah India maupun pemerintah berbagai negara Asia Tenggara dalam menentukan dwikewarganegaraan. Akibatnya, sulit merumuskan langkah strategis dalam menjadikan generasi kedua dan ketiga diaspora India di bawah payung hukum setiap negara.

POSISI INDIA DALAM PERGULATAN ASIA

Kebijakan diaspora yang diterapkan oleh India sudah pasti menjadi komoditas politis. Bangunan imajinasi negara hanya dihubungkan dengan nilai ekonomis. Mereka secara implisit mengikis ikatan bangsa. Selain itu, kita juga mengamati pola perspektif yang digunakan oleh India. Penyisipan kepentingan India, negara bukan bangsa, dengan negara Barat (*developed country*) justru mengurangi integritas dan solidaritas Asia. Kondisi itu tampaknya tidak jauh berbeda dari kebijakan diaspora yang dilaksanakan di negara Afrika francophone (berbahasa Prancis) (Haokip: 2010). Pengabaian konteks sejarah dan budaya Asia menjauhkan India dalam pusat regional mereka dari negara tetangganya. Keadaan demikian dikritik oleh Chen-Kuan Hsing. Ia mengingatkan agar Asia menghentikan dirinya sebagai objek sejarah. Kini, saatnya Asia menjadi produk sejarah yang mempunyai peran aktif dalam proses sebagai subjek sejarah (2010: 155). Kebijakan diaspora itu menjadi nyata bahwa India yang mewakili Asia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh kuat Barat. Apalagi, mengingat sikap mental terhadap "*inlander*" negara kolonial sangat sulit dihapus yang secara tidak langsung melanggengkan konstruksi pola pikir Barat. Dengan demikian, identitas budaya India

dalam proses Asianisasi cenderung bersifat eksklusif. Kritik yang serupa disampaikan oleh Ichiyo Muto (2010): untuk membangun Inter-Asia dibutuhkan relasi memanfaatkan sumber daya Asia sehingga memangkas jarak dengan Barat.

SIMPULAN

Setelah melakukan analisis di atas, saya dapat mengamati secara gamblang bahwa pembangunan konsep diaspora lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi. Sementara itu, faktor lain, seperti sejarah dan budaya, berkesan dinomorduakan. Masalah deskriminasi yang dialami oleh sebagian besar diaspora India di Malaysia dan Singapura hanya dijadikan bahan laporan. Pemerintah India juga masih sulit memberikan kelonggaran kepada generasi kedua atau ketiga untuk terikat dengan India dengan skema kartu PIO/CIO. Polemik itu semakin runcing ketika ada respon kebijakan balik sehingga terjadi tumpang tindih seperti dalam penerapan konsep dwikewarganegaraan (*dual citizenship*).

Kondisi tersebut telah membuat dikotomi antara identitas negara dan bangsa. Pemerintah India begitu mengedepankan identitas negara daripada bangsa. Tarik-menarik ini menjadikan negara sebagai praktik pasar daripada praktik budaya. Diaspora, migrasi, dan transnasional dalam konteks globalisasi digunakan sebagai pemanfaatan memori kolektif (Jeong-Won: 2005). Mereka memfungsikan identitas budaya dan negara secara esensial (*fixed*) melalui kartu PIO/CIO. Tidak cukup sampai di situ, pemberian kartu PIO/CIO bagi diaspora India diterapkan sesuai dengan struktur sosial.

Tentu, apa yang telah dipraktikkan oleh India tidak sesuai dengan spirit kajian Inter-Asia. India seolah memosisikan diri sebagai negara Barat. Sisa-sisa konstruksi Barat terus dijaga sebagai bangunan yang akan membentuk pola kenegaraan dan kebangsaan. Asia Tenggara; bukan dianggap sebagai mitra melainkan sebagai bawahan. Sikap itu ditunjukkan dengan deskriminasi kebijakan yang lebih mementingkan diaspora di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Dengan begitu, tidak ada upaya India untuk dekolonialisasi dan deimperialisasi di berbagai negara Asia, terutama Asia Tenggara yang memiliki perekonomian di bawah pengaruh India.

Secara umum, kebijakan diaspora oleh pemerintah India di Asia Tenggara tidak mampu membangun kembali sejarah hubungan budaya. India hanya mencari peluang dalam prospek negara berkembang untuk membantu investasi negara. Maka, akan sangat menarik jika ada studi lanjutan yang terkait dengan perspektif India sebagai negara pascakolonial tentang sesama bekas negara jajahan. Pengetahuan tentang perspektif India akan banyak membantu untuk menganalisis lebih dalam efektivitas kebijakan diaspora yang sudah ditetapkan oleh pemerintah India.

DAFTAR REFERENSI

- Annual Report 2012-2013. Government of India: Ministry of Overseas Indian Affair.
Baubock, Reiner dan Thomas Faist (ed). 2010. *Diaspora and Transnasionalism: Concepts,*

Theories, and Methods, 295–321. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Budianta, Melani. 2014. *Whose Home: Work Migration and Cultural Belonging in A Globalized Asia*. Akan diterbitkan.

Crane, Diana. 2002. *Culture and Globalization: Theoretical Models and Emerging Trends*. London, New York: Routledge

Fu Tuan, Yi. 2002. *Space and Place: The Perspective of Experience*. Minniapolis: University of Minnesota Press.

Haokip, Paokholal. 2010. India's Diaspora Policy in Africa: Half-Baked for Francophone. *Insight on Africa* 2, no. 1: 33–47.

High Level Committee Reports. Government of India: Ministry of Overseas Indian Affair.

Indranila, Padma. 2012. Nasionalisme Jarak Jauh: Praktik Kultural Sebuah Keluarga India. *Etnohistori edisi India di Indonesia*. Diakses di <http://etnohistori.org/> pada Selasa, 2 Desember 2014, pukul 17.00 WIB.

Karla, Virender, dkk. 2005. *Diaspora and Hybridity*, 28–40. London: Sage.

Kuan Hsing, Chen. 2010. *Asia as Method: Towards Deimperialization*, 152–182. London: Duke Univesity Press.

Misra, Rahul. 2011. *Mosaic of Culture: Investigating the Role of Linkages in Indonesia Relations*. IDSA Issue Brief.

Muto, Ichiyo. 2010. Asia, Inter-Asia, and Movement: Decolonization into the Future. *Inter-Asia Cultural Studies* 11, no 2.

Park, Jeong-Won. 2005. The National Identity of A Diaspora: A Comparative Study of the Korean Identity in China, Japan, and Uzbekistan. Disertasi.

Periasamy, Makeswary. 2007. Indian Migration Into Malaya and Singapore During the British Period. *BibilioAsia* 3, no. 3: 4–11.

Sahoo, Sadananda dan B.K., Pattanaik (ed). 2014. *Global Diasporas and Development: Socio Economic, Cultural, and Policy Economic*. New Delhi: Spinger.

Sandhu, Singh dan Mani, K. 2006. *Indian Communities in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Setyaningrum, Arie. 2004. Globalisasi dan Diaspora Cina dalam Perspektif Post-Kolonial: Dinamika Strategi Ekonomi dalam Identitas Budaya. *Jurnal Ilmu Politik dan Sosial* 2, no. 2: 181–196.

-----, 2014. Sori, Bukan Untuk India. *Majalah Detik* Edisi 26 Mei - 1 Juni.

Strategic Plan for Next Five Years. Government of India: Ministry of Overseas Indian Affair.

www.diasporaindonesia.org (Situs resmi dispora Indonesia)

www.immihelp.com (Situs resmi pemerintah India)

www.indiandiaspora.nic.in (Situs resmi diaspora India)

www.moia.gov.in (Situs resmi pemerintah India)

www.indianembassyjakarta.com (Situs resmi kedutaan India di Jakarta)